

**IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG
PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH
TANAH DAN AIR PERMUKAAN DI SUMATERA UTARA**

TESIS



Oleh

ALEXIUS SITIO
NPM. 081801087

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2009**

**IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG
PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH
TANAH DAN AIR PERMUKAAN DI SUMATERA UTARA**

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister Administrasi Publik (MAP)
Program Pascasarjana Universitas Medan Area



Oleh

ALEXIUS SITIO
NPM. 081801087

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2009**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pajak Pengambilan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan di Sumatera Utara
N a m a : Alexius Sitio
N P M : 081801087

Menyetujui

Pembimbing I



Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA.

Pembimbing II



Drs. Kariono, MA

**Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik**



Drs. Kariono, MA

Direktur



Drs. Heri Kusmanto, MA

Telah diuji pada Tanggal 03 Maret 2009

N a m a : Alexius Sitio

N P M : 081801087



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Drs. Usman Tarigan, MS.

Sekretaris : Warjio, SS, MA

Pembimbing I : Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA.

Pembimbing II : Drs. Kariono, MA

Penguji Tamu : Drs. Agus Suriadi, MA

A B S T R A K

Implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan di Sumatera Utara

Alexis Sitio, NPM. 071801087

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, Pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Salah satu pajak daerah yang belum optimal penerimaannya adalah Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. analisa data yaitu metode deskriptif, yaitu suatu metode dimana data yang diperoleh disusun kemudian diinterpretasikan sehingga memberikan keterangan terhadap permasalahan yang diteliti dengan menggunakan tabel tunggal.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, populasi sasaran pada penelitian ini adalah seluruh komponen yang terlibat dalam implementasi Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Permukaan di Provinsi Sumatera Utara, sampel diambil secara purposive sampling sebanyak 34 orang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Perda Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Permukaan di Propinsi Sumatera Utara dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara umum belum dapat dilaksanakan dengan baik. Kontribusi Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi Sumatera Utara masih relatif kecil yaitu hanya sebesar 1,16 persen, sedangkan kontribusi terbesar berasal dari pajak Kenderaan Bermotor. Penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Permukaan di Propinsi Sumatera Utara dalam lima tahun terakhir (2004-2008) terus mengalami peningkatan, yang berarti potensi Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Permukaan di Propinsi Sumatera Utara masih cukup besar. Faktor utama yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Perda Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Permukaan di Propinsi Sumatera Utara belum berjalan efektif adalah faktor faktor keterbatasan sumberdaya manusia dan sarana / prasarana yang ada serta masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Permukaan di Propinsi Sumatera Utara.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan, Pajak Air Bawah Tanah, Sumatera Utara.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis sanjungkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini sebagai suatu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Adapun judul Tesis ini adalah “ *Implementasi Kebijakan Perda Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Permukaan di Propinsi Sumatera Utara*”. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih dirasakan sekali banyak kekurangan dan kelemahan, mengingat keterbatasan penulis. Penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, motivasi, dan partisipasi berbagai pihak, baik secara moril dan materil yang diberikan kepada penulis. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan syukur dan terima kasih yang banyak kepada :

1. Bapak Prof.Dr. H. M. Yacob Matondang MA, Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Drs. Heri Kumanto, MA, Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area
3. Bapak Drs. Kariono, MA, Ketua Program Studi MAP, sebagai Pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahaan serta masukan yang sangat dalam penyelesaian tesis ini.
4. Bapak Prof.Dr. Marlon Sihombing, MA , sebagai Pembimbing I, yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyelesaian tesis ini.
5. Bapak dan Ibu dosen serta staf pengajar PPs Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area yang telah memberikan bekal ilmu serta kelancaran dalam proses penyusunan dan penyelesaian Tesis ini.

Terimakasih pula kepada istri dan anak-anak tercinta dan seluruh keluarga, yang senantiasa memberi dorongan dan semangat serta do`a demi keberhasilan dan kesuksesan penulis.

Medan, April 2009

P e n u l i s

Alexius Sitio

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|------------------------------------|---|
| 1.1 . Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 . Perumusan Masalah | 5 |
| 1.3 . Tujuan Penelitian | 6 |
| 1.4 . Manfaat Penelitian..... | 6 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|--|----|
| 2.1 . Kebijakan Publik | 7 |
| 2.1.1. Pengertian Kebijakan Publik..... | 7 |
| 2.1.2. Proses Kebijakan Publik | 11 |
| 2.1.3. Implementasi Kebijakan Publik | 17 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|---------------------------------------|----|
| 3.1 . Bentuk Penelitian | 26 |
| 3.2 . Populasi dan Sampel | 26 |
| 3.3.1. Populasi | 26 |
| 3.3.2. Sampel..... | 26 |
| 3.3 . Teknik Pengumpulan Data..... | 26 |
| 3.4 . Operasionalisasi Varibael | 27 |
| 3.5 . Teknik Analisis Data | 27 |

BAB IV GAMBARAN UMUM SUMATERA UTARA

| | |
|---|----|
| 4.1 . Sejarah Propinsi Sumatera Utara | 28 |
| 4.2 . Letak Geografis | 33 |
| 4.3 . Keadaan Kependudukan | 36 |
| 4.4 . Indeks Pembangunan Manusia..... | 47 |
| 4.5 . Perekonomian | 54 |
| 4.6 Ketenagakerjaan | 62 |

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|--------------------------------------|----|
| 5.1 . Hasil Penelitian | 78 |
| 5.1.1. Karakteristik Responden | 78 |
| 5.1.2. Variabel Penelitian | 81 |
| a. Organisasi | 81 |
| b. Interpretasi | 91 |
| c. Penerapan | 93 |
| 5.2 . Analisis Data | 98 |

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|-----------------------|-----|
| 6.1. Kesimpulan | 111 |
| 6.2. Saran | 112 |

| | |
|-----------------------------|------------|
| DAFTAR PUSTAKA | 113 |
|-----------------------------|------------|



DAFTAR TABEL

| Nomor | Judul | Halaman |
|-------|--|---------|
| 4.1 | Luas Wilayah dan Letak Di Atas Permukaan Laut Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota | 34 |
| 4.2 | Luas Wilayah Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota | 35 |
| 4.3 | Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin..... | 37 |
| 4.4 | Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Kabupaten/Kota | 40 |
| 4.5 | Wilayah, Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten / Kota..... | 44 |
| 4.6 | Jumlah Penduduk Menurut Daerah Kota dan Pedesaan dan Kabupaten/Kota..... | 46 |
| 4.7 | Posisi IPM – Provinsi di INDONESIA – 2006..... | 48 |
| 4.8 | Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota | 49 |
| 4.9 | Produk Domestik Regional Bruto Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku 2003 - 2005 | 55 |
| 4.10 | Produk Domestik Regional Bruto Sumatera Utara Menurut Sudut Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku 2003 - 2005 | 57 |
| 4.11 | Kondisi Makro Sosial Ekonomi Sumatera Utara Tahun 2003-2004 Dan Kondisi yang Diharapkan Tahun 2005-2009..... | 58 |
| 4.12 | Perbandingan Inflasi di Sumatera Utara dan Nasional Februari 2004-2005..... | 59 |
| 4.13 | Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Industri Besar/Sedang Menurut Golongan Industri 2004 | 61 |
| 4.14 | Banyaknya Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan 2002 – 2005 (Jiwa)..... | 63 |

| | | |
|------|--|----|
| 4.15 | Banyaknya Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur | 64 |
| 4.16 | Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama 2004-2005..... | 65 |
| 4.17 | Persentase Angkatan Kerja Berumur 15 Tahun Ke atas Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan 2005..... | 66 |
| 4.18 | Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas Menurut Jenis Kelamin dan Kegiatan Seminggu Yang Lalu..... | 67 |
| 4.19 | Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Selama Seminggu Yang lalu Menurut Kab/Kota dan Kelompok Lapangan Usaha..... | 69 |
| 4.20 | Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama..... | 59 |
| 4.21 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten / Kota..... | 73 |
| 4.22 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten / Kota..... | 77 |
| 5.1 | Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin..... | 79 |
| 5.2 | Distribusi Responden Menurut Umur..... | 80 |
| 5.3 | Distribusi Responden Menurut Pendidikan..... | 80 |
| 5.4 | Distribusi Responden Menurut Kedudukan dalam program | 81 |
| 5.5 | Pendapat Responden Tentang Pengetahuan Kebijakan Perda Nomor 6 Tahun 2002..... | 83 |
| 5.6 | Pendapat Responden Tentang Pengetahuan Tujuan Program | 84 |
| 5.7 | Pendapat Responden Tentang Pengetahuan Adanya Perangkat Aturan dalam Kebijakan | 85 |
| 5.8 | Pendapat Responden Tentang Pengetahuan Adanya Peraturan Tertulis dalam Pelaksanaan Kebijakan Perda Nomor 6 Tahun 2002..... | 86 |

| | | |
|------|--|-----|
| 5.9 | Pendapat Responden Tentang Pengetahuan Adanya Peraturan Tertulis dalam Pelaksanaan Kebijakan Perda Nomor 6 Tahun 2002..... | 86 |
| 5.10 | Pendapat Responden Tentang Pemahaman Peraturan dalam Kebijakan Perda Nomor 6 Tahun 2002..... | 88 |
| 5.11 | Pendapat Responden Tentang Ketersediaan Sumberdaya Manusia Mendukung Kelancaran Kebijakan Perda Nomor 6 Tahun 2002..... | 89 |
| 5.12 | Pendapat Responden Tentang Ketersediaan Sarana dalam Mendukung Kelancaran Kebijakan Perda Nomor 6 Tahun 2002..... | 90 |
| 5.13 | Pendapat Responden Tentang Kesesuaian Kebijakan Perda Nomor 6 Tahun 2002 dengan Peraturan..... | 91 |
| 5.14 | Pendapat Responden Tentang Kesesuaian Kebijakan Perda Nomor 6 Tahun 2002 dengan Petunjuk Pelaksana | 92 |
| 5.15 | Pendapat Responden Tentang Kesesuaian Kebijakan Perda Nomor 6 Tahun 2002 dengan Petunjuk Operasional..... | 93 |
| 5.16 | Pendapat Responden Tentang Kesesuaian Kebijakan Perda Nomor 6 Tahun 2002 dengan Prosedur Kerja..... | 95 |
| 5.17 | Pendapat Responden Tentang Kesesuaian Kebijakan Perda Nomor 6 Tahun 2002 dengan Program Kerja..... | 96 |
| 5.18 | Pendapat Responden Tentang Kesesuaian Kebijakan Perda Nomor 6 Tahun 2002 dengan Jadwal Kerja..... | 96 |
| 5.19 | Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2008 | 104 |
| 5.20 | Perkembangan Penerimaan Pajak ABT-APU Tahun 2004-2008..... | 106 |

B A B I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 (dirubah dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004) telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan Pusat dan Daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang dikenal sebagai era otonomi daerah.

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. Sementara, sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai yakni sekurang-kurangnya sebesar 25 persen dari Penerimaan Dalam Negeri dalam APBN, namun, daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan PADnya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD-nya (Mahfud, 2005). Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor

peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur PAD yang utama.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, Pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Walaupun telah diberlakukannya Otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 serta peraturan perundang-undangan pendukung lainnya, berbagai macam respon timbul dari daerah-daerah. Diantaranya ialah bahwa pemberian keleluasaan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan PAD melalui pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 telah memperlihatkan hasil yang menggembirakan yaitu sejumlah daerah berhasil mencapai peningkatan PAD-nya secara signifikan. Namun, kreativitas Pemerintah Daerah yang berlebihan dan tak terkontrol dalam memungut pajak daerah dan retribusi daerah, akan menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat dan dunia usaha, yang pada gilirannya menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tetap memberikan batasan kriteria pajak daerah dan retribusi yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Kepala Daerah diberi peluang untuk menggali potensi sumber Pendapatan Asli Daerah. Dalam upaya peningkatan PAD Provinsi Sumatera Utara, telah dikeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, James E, 1976, *Public Policy Making*, New York, Holt Rinechart and Winston.
- Dye, Thomas R., 1995, *Understanding Public Policy*, New Jersey: Prentice Hall.
- Dunn, William N, 1994, *Public Policy Analysis; An Introduction*, Englewood Clifs, New Jersey, Prentice-Hall Inc, Indonesian Edition: Pengantar Analisis Kebijakan Publik, 1998, Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho, *Otonomi Daerah : Desentralisasi Tanpa Revolusi*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2000.
- Dunn, William N., 1999, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dye, Thomas R., 1995, *Understanding Public Policy*, New Jersey: Prentice Hall.
- Edward III, 1980. *Implementation Public Policy*. Washington DC : Congressional Quarter Press.
- Gibson, James L. *Organisasi dan Manajemen*, Penerbit Erlangga. Jakarta. 1990
- Grindle, Merilee S., (ed), 1980, *Politics and Apolicy Implementation in the Third World*, new jersey: Princetown University Press.
- Islamy, M. Irfan, 2000, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika..
- Jones, Charles O., 1991. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pemerintah Kota Medan, 2002. *Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 37 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata* .
- Pemerintah Kota Medan, 2006. *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2006 - 2026* . Bappeda Kota Medan
- Pemerintah Kota Medan, 2006. *Rencana Stretegis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan 2005-2010* . Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Medan.
- Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier, 1983, *Implementation and Public Policy*, New York: HarperCollins.

- Meter, Donald Van, dan Carl Van Horn, 1975, *"The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework dalam Administration and Society 6*, 1975, London: Sage.
- Nugroho D, Riant, 2004. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo
- Osborne, David, dan Ted Gaebler, 1993, *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*, New York: Plume Book.
- Republk Indonesia, 2004. *Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta : CV. Tamita Utama.
- Sugiyono, 2004. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : Alfabeta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, *"Good Governance: Paradigma Baru Manajemen Pembangunan"*, Jakarta, 20 Juni 2000, *kertas kerja*.
- Toha, Miftah, 2005, *Perspektif Perilaku Birokrasi*, Jakarta: Rajawali.
- Turner, Mark, dan David Hulme, 1997, *Governance, Administration, and Development*, London: MacMillan Press, 1997.
- Wahab, Solichin Abdul, 2002, *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wibawa, Samudra, 2004. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Raja Grafindo Persada,

**DAFTAR NAMA-NAMA WAJIB PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH
TANAH DAN PERMUKAAN PROPINSI SUMATERA UTARA**

| No | NAMA WP / ALAMAT (KEL/DESA/KEC/KAB/KO TA) | GOL WP (*) I = Industri I = Industri | JUMLA H TITIK | ABT I = Industri I - Industri | | APU I=Industri I=Industri | |
|----|--|---|---------------------|-------------------------------------|------|---------------------------------|------|
| | | | | K I | K II | K I | K II |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ROSMAN Kilang Mie "UD. Bung Sari" Jl. Ir. H. Juanda Kec. Rambutan | 1 | 1 | | K2 | | |
| 2 | HUSIN "Kilang Ubi" Jl. Bani Hasyim T.Tinggi | 1 | 1 | K1 | | | |
| 3 | TREND AIR MINERAL Bagelan, T.Tinggi | 1 | 1 | K1 | | | |
| 4 | HJ. LASMAWATI Hotel "Safari" Jl. G. Subroto Kel. Baru Kec. P. Hulu | 1 | 1 | K1 | | | |
| 5 | SOFYAN HARTONO Pencucian Sagu "Setia Kawan" Jl. D. Sundoro Kel. Bagian Kec. P. Hilir | 1 | 1 | K1 | | | |
| 6 | SOFYAN HARTONO Kilang Ubi "Setia Kawan" Jl. S. Zakaria Kel. T.Tinggi Kec. P. Hulu | 1 | 1 | K1 | | | |
| 7 | Y A K I N Kilang Ubi "Sum. Telaga Tapioka" Jl. Ir. H. Juanda Kec. Rambutan | 1 | 1 | K1 | | | |
| 8 | SONY EFENDI Door Smeer "Cahaya" Jl. K.F. Tandean Kec. Rambutan | 1 | 1 | K1 | | | |
| 9 | BACHTIAR RANI "Gudang Sawit" Jl. Sukarno Hatta T.Tinggi | 1 | 1 | K1 | | | |
| 10 | AMNA YETTY / ALFIAN | 1 | 1 | K1 | | | |
| 11 | EDY HARTONO Door Smeer "Istana Mobil" Jl. S.M. Raja Kel. B.Sono Kec. P. Hulu | 1 | 1 | K1 | | | |
| 12 | TONI LUKMAN "PT. BANDAR BUNDER" Jl. Batu Bara Kel. Satria Kec. P. Hilir | 1 | 1 | K1 | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|---|---|----|----|--|----|
| 13 | IR. ASMARA LUBIS Pabrik Es "Tingon Dongan" Jl. Sukarno Hatta P. Hulu | 1 | 1 | K1 | | | |
| 14 | KHO SUO IH Kilang Mie "Melati" Jl. Pala Kec. Rambutan | 1 | 1 | K1 | | | |
| 15 | DR. H.T.M. YUSUF "RSU SRI PAMELA" Jl. Sudirman Kec. Rambutan | 1 | 1 | K1 | | | |
| 16 | AMARUDDIN Kilang Mie "Subur JAya" Jl. Sukarno Hatta Kel. Pabatu Kec. P. Hilir | 1 | 1 | K1 | | | |
| 17 | SAMIJO "Pabrik Bintang Mas" Jl. G. Subroto Kel. Pabatu Kec. P. Hulu | 1 | 1 | K1 | | | |
| 18 | H. RIDWAN GOZALI Hotel "Malibou" l. Sudirman S.Padang Kec. Rambutan | 1 | 1 | K1 | | | |
| 19 | SAFIRUDDIN OLOAN P. Door Smeer "Indah Motor" Jl. K.F. Tandean Kel. B.Utama Rambutan | 1 | 1 | K1 | | | |
| 20 | HADIANTO "GUDANG SAWIT 16" Jl. Imam Bonjol Kec. P. Hilir | 1 | 1 | K1 | | | |
| 21 | LOSMEN MORA Jl. Sakti Lubis T.Tinggi | 1 | 1 | K1 | | | |
| 22 | YUSNARDI PT. Adei Crumb Rubber Jl. I. Bonjol Kel. Kesatria Kec. P. Hilir | 1 | 1 | | | | K1 |
| 23 | LELE TANJUNG Jl. Setia Budi Kel. Brohol Kec. Rambutan | 1 | 1 | | | | K1 |
| 24 | HERMAN WETAN PT. Darmex Crumb Rubber Jl. Ir. H. Juanda Brohol Kec. Rambutan | 1 | 1 | | | | K1 |
| 25 | DRS. ASRIL SUTAN AMIR PT. Batang Hari Tebing Pratama Jl. H.M.Yamin, SH Kel. Tambangan | 1 | 1 | | | | K1 |
| 26 | PDAM TIRTA BULAN Jl. P.Pejuan No. 55 Kec. P. Hilir | 1 | 1 | | | | K2 |
| 27 | SUKA DAMAI INDAH HOTEL Ds. Sukadamai Kec. T.Tinggi | 1 | 1 | | K2 | | |